

# INOVASI MENGHADANG INFLASI

Himpunan Terobosan Program dari Jawa Timur



# INOVASI MENGHADANG INFLASI

Himpunan Terobosan Program  
dari Jawa Timur





## SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TIMUR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur Tahun 2015 akhirnya dapat diselesaikan. Laporan ini mencatat berbagai upaya dan sinergitas antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota, beserta Badan Pusat Statistik, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa di Jawa Timur.

Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada TPID Provinsi Jawa Timur atas soliditas koordinasi dan sinergitas kebijakan dengan TPID Kabupaten/Kota sehingga dapat menekan laju gejala kenaikan harga barang dan jasa akibat berbagai tantangan pengendalian inflasi ditengah ancaman anomali iklim El Nino di tahun 2015. Kerja keras dan kerja cerdas yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Jawa Timur dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Jawa Timur yaitu dengan mampu menahan laju inflasi Provinsi Jawa Timur di bawah inflasi

Nasional yaitu pada angka 3,08 selama tahun 2015.

Ke depan, saya berharap kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur dapat tetap mempertahankan kinerja yang baik ini dengan terus menjaga sinergitas dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/ Kota. TPID Jawa Timur juga diharapkan dapat terus memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada para pengambil kebijakan untuk selalu menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa di Provinsi Jawa Timur sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah.

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam upaya menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa di Jawa Timur dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

GUBERNUR JAWA TIMUR  
**Dr. H. SOEKARWO, SH, MHum**

### **Inovasi Menghadang Inflasi:** Himpunan Terobosan Program dari Jawa Timur

Penulis: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur

Penerbit:

#### **SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) JAWA TIMUR**

Biro Administrasi dan Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur  
Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya | Telp. 031-3524001

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur  
Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya | Telp. 031-3520011

Cetakan Pertama, Tahun 2015

#### **Hak cipta dilindungi undang-undang**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

#### **UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR



**INFLASI** yang rendah, stabil dan terkendali merupakan faktor penting dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga daya beli masyarakat yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Angka inflasi yang rendah dan stabil diperlukan untuk dapat menjaga suku bunga riil domestik tetap kompetitif sehingga mendorong terjaganya nilai tukar Rupiah dan tercipta kepastian di kalangan pelaku usaha yang berujung pada meningkatnya aktivitas perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, inflasi yang rendah dan stabil juga sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian dan pencapaian inflasi yang rendah dan stabil menjadi penting dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagaimana inflasi di Indonesia, inflasi di Jawa Timur selain dipengaruhi sisi permintaan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan sisi *supply* yang tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor alam. Oleh karena itu, pengendalian inflasi di Jawa Timur merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Bank Indonesia. Tanggung jawab tersebut tercermin dalam bentuk Tim Pengendalian Inflasi

Daerah (TPID) Jawa Timur yang merupakan wadah koordinasi antar instansi terkait untuk mengendalikan inflasi. Dalam menyikapi berbagai potensi risiko inflasi, TPID Jawa Timur senantiasa melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi yang mengacu pada 5 (lima) strategi utama pengendalian inflasi TPID Jawa Timur mengusung *tagline* "GADIS REMO KANGEN", yaitu: (i) penguatan kelembagaan, (ii) produksi, distribusi dan konektivitas, (iii) regulasi dan monitoring, (iv) kajian dan analisis, dan (v) pengendalian ekspektasi. Sepanjang tahun 2015, kami memandang TPID Jawa Timur sudah dapat menjalankan tugas dengan baik dan optimal sebagaimana terlihat dari inflasi yang relatif stabil, sehingga secara tahunan inflasi Jawa Timur mencapai 3,08%, lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional (3,35%). Pencapaian inflasi yang lebih rendah dari nasional, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2015 hingga mencapai 5,44% dan lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat 4,79%.

Oleh karena itu, apresiasi patut disampaikan kepada TPID Jawa Timur atas upaya pengendalian inflasi yang tepat dan efektif diantaranya melalui pelaksanaan beberapa program dalam rangka Antisipasi Dampak El Nino, Operasi Pasar Bantuan Ongkos Angkut, Langkah Antisipasi peningkatan konsumsi BBM dan LPG menjelang Lebaran, Bazaar Ramadhan dan Operasi

Pasar Bulog, serta Angkutan Mudik Balik Gratis. Dari sisi fundamental, pengendalian ekspektasi masyarakat juga telah berjalan dengan baik melalui diseminasi informasi harga dan kegiatan TPID melalui berbagai media masa. Hal ini tercermin dari relatif aman dan terkendalinya ekspektasi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di tahun 2015.

Ke depan, disamping perlunya terus menjaga soliditas koordinasi antar instansi, TPID Jawa Timur juga perlu mendorong peningkatan peran TPID dari aspek kajian dan analisis lintas instansi sebagai rujukan pengambilan keputusan dalam mengantisipasi pengendalian inflasi. Kajian dan analisis tersebut dapat diarahkan terutama pada aspek produksi dan distribusi dalam mendukung ketahanan pangan Jawa Timur dan tercapainya target sasaran inflasi Jawa Timur sebesar  $4\% \pm 1\%$ .

Pengarah TPID Jawa Timur  
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur

**Benny Siswanto**  
Direktur Eksekutif

# KATA PENGANTAR



**PUJI SYUKUR** senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, buku Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur Tahun 2015 akhirnya dapat diselesaikan. Laporan ini mencatat berbagai upaya dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa di Jawa Timur sehingga dapat mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil.

Kinerja TPID Jawa Timur telah terbukti sangat solid. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa. Secara kelembagaan selama tahun 2015 telah terbentuk 39 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jawa Timur, yang terdiri dari 38 TPID Kabupaten/Kota dan satu TPID Provinsi Jawa Timur. Selain pencapaian tersebut, TPID Jawa Timur telah secara intensif melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain *High Level Meeting* yang rutin dilaksanakan tiga bulan sekali, Bantuan Ongkos Angkut pada hari-hari besar keagamaan, berbagai program dalam rangka antisipasi dampak anomali iklim El Nino, serta diseminasi berbagai kebijakan dan strategi pengendalian inflasi kepada masyarakat. TPID Jawa Timur juga secara rutin mengamati perkembangan harga bahan pokok masyarakat dan menginformasikan secara langsung kepada masyarakat yang dapat diakses melalui *website www.siskaperbapo.com*. Upaya ini secara langsung dapat menjaga ekspektasi harga masyarakat terhadap harga tetap terjangkau.

Selama tahun 2015, koordinasi pengendalian inflasi oleh TPID Jawa Timur juga dilakukan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lainnya di wilayah Jawa Timur yang terdiri dari 38 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota. Semua kerja keras dan soliditas Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ada di Jawa Timur telah terbukti dan membuahkan hasil sebagaimana tercermin dari relatif stabilnya harga pangan di Jawa Timur ditengah ancaman anomali iklim El Nino di tahun 2015. Hal tersebut merupakan bentuk nyata kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kinerja TPID Jawa Timur yang sangat baik selama ini merupakan akumulasi dukungan dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini, perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur, yaitu dinas/instansi terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia Wilayah IV, Bulog Divre Regional V Jawa Timur, serta Badan Pusat Statistik, media masa, dan berbagai pihak terkait atas peran sertanya dalam upaya stabilisasi harga serta penyusunan buku laporan pelaksanaan tugas ini. Kami sampaikan pula terima kasih kepada Dewan Pengarah yang telah memberikan arahan-arahan dan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan tugas-tugas kami selama ini.

Kami menyadari bahwa peran serta TPID Jawa Timur sebagai ujung tombak menjaga inflasi dan keterjangkauan harga barang dan jasa di Jawa Timur masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak yang berkepentingan. Kiranya kerjasama yang sangat baik dengan berbagai pihak selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan melindungi setiap langkah kita.

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah  
Jawa Timur

**DR. H. Akhmad Sukardi, MM**

# Daftar Isi

## Memerangi Inflasi Tinggi [ 1 ]

Inflasi menjadi momok bagi perekonomian banyak negara. Tak sedikit kisah tragis konflik sosial dan lengsernya kekuasaan terjadi karena inflasi melambung tinggi. Indonesia, khususnya Jawa Timur, belajar dari banyak kisah itu dengan terus memperbaiki manajemen pengelolaan inflasi. Sinergi banyak kalangan menjadi kunci keberhasilan.

## Bersiasat Hadapi Anomali Musim (7)

Anomali iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat sektor pertanian. Hasil panen bisa berantakan. TPID Jatim melakukan banyak siasat antisipasi. Upaya memastikan panen tak terhambat, sehingga pasokan tak terlambat.

## Menyambung Temali Petani dan Korporasi (11)

TPID Jawa Timur dengan berbagai elemen di dalamnya menynergikan salah satu BUMD Provinsi Jatim dengan koperasi petani. Petani lebih mudah mendapat modal dan jangkauan pemasaran.

## Satu Informasi agar Pedagang Culas Tak Main Harga Sendiri (15)

Pemprov Jatim melakukan inovasi dengan pendekatan teknologi informasi untuk memangkas *asymmetric information* di bidang perdagangan komoditas. Efektif menutup celah pedagang yang berniat seenak hati memainkan harga sendiri.

## Perkuat Produksi dan Daya Saing Petani lewat Cooperative Farming (19)

Para petani di Jawa Timur didorong untuk membangun model *cooperative farming*. Petani secara bersama-sama membangun daya saingnya. Pemerintah menjembatani lewat beragam fasilitasi sesuai keunggulan masing-masing kelompok tani.

## Agar Petani Jadi Manajer di Lahan Sendiri (23)

Pemerintah membikin Taman Teknologi Pertanian sebagai sarana unjuk penerapan teknologi ke sektor agraris. Berhasil memancing kaum muda untuk menggeluti sektor yang kerap dinilai minor ini.

## Cara Cerdas Rem Gejolak Harga (27)

Upaya mengatasi lonjakan harga tidak melulu dengan mengatur penawaran dan permintaan komoditas semata. Ada komponen biaya yang bisa ditekan, atau diintervensi melalui subsidi, yaitu ongkos angkut. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur melakukannya saat mengantisipasi lonjakan harga menjelang puasa dan Lebaran 2015.

## Mudik Gembira dengan Tarif Angkutan Terjangkau Warga (31)

Program mudik gratis Pemprov Jatim membantu masyarakat dalam menghadapi momen Lebaran. Berkontribusi pada upaya pengendalian inflasi yang berujung pada terjaganya daya beli warga.

## Sertifikasi Hortikultura untuk Menembus Pasar Dunia (35)

Tak semudah membalik telapak tangan untuk membawa komoditas hortikultura Jawa Timur bisa digdaya di negeri sendiri sekaligus terbang ke negeri seberang. Pemerintah bergegas meningkatkan daya saing dan daya jual hortikultura lokal dengan sertifikasi dan standarisasi lembaga internasional.

## Infrastruktur Pertanian yang Menjaga Harapan (39)

Para pemangku kepentingan di Jawa Timur bersinergi mendorong terwujudnya sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Infrastruktur pertanian menjadi kunci, sehingga terus dipacu dan diperluas pembangunannya.

## Gotong Royong Membesarkan Ternak Potong (43)

Jawa Timur, yang dikenal sebagai gudang ternak, dihadapkan pada tantangan pengembangan sektor peternakan untuk bisa memasok kebutuhan warga yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Sinergi banyak kalangan berhasil mendorong program kemitraan ternak potong untuk meningkatkan efisiensi tata niaga pangan di provinsi ini.



# Memerangi Inflasi Tinggi

Inflasi menjadi momok bagi perekonomian banyak negara. Tak sedikit kisah tragis konflik sosial dan lengsernya kekuasaan terjadi karena inflasi melambung tinggi. Indonesia, khususnya Jawa Timur, belajar dari banyak kisah itu dengan terus memperbaiki manajemen pengelolaan inflasi. Sinergi banyak kalangan menjadi kunci keberhasilan.

**1 DESEMBER 2015**, menjadi momen penting bagi hubungan bilateral antara Zimbabwe dan Republik Rakyat China. Pada hari tersebut, Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan ke negara yang berada di wilayah selatan benua Afrika tersebut. Kedatangan Xi Jinping menjadi penting karena ini adalah kali pertama sejak 20 tahun lamanya, seorang pemimpin tertinggi negara China melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Zimbabwe.

Kunjungan ini memang bukan kunjungan kenegaraan biasa. Pemerintah dan rakyat Zimbabwe menyambut kunjungan ini dengan penuh suka cita. Ibarat menyambut kawan akrab yang lama tak bersua. Dalam kunjungannya, Presiden China Xi Jinping menegaskan komitmen untuk membantu Zimbabwe dan menjadikan negara tersebut sekutu terdekatnya di kawasan Afrika. Dalam rangkaian lawatan tersebut turut ditandatangani pula berbagai perjanjian, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan ekonomi Zimbabwe yang remuk redam dihantam krisis ekonomi.

Hubungan kedua negara memang sedang dalam tahap paling mesra dalam sejarah. Bagaimana tidak, sang negara adidaya dari

kawasan Asia ini menghapuskan utang Pemerintah Zimbabwe yang telah jatuh tempo senilai US\$ 40 juta atau lebih dari Rp 500 miliar. Zimbabwe pun membalas “budi baik” pemerintah China ini dengan mengadopsi mata uang China, Yuan, menjadi salah satu mata uang resmi dalam transaksi sehari-hari masyarakat Zimbabwe, melengkapi berbagai mata uang asing lain yang sudah digunakan sebelumnya seperti Dollar Amerika Serikat, Rand Afrika Selatan, dan berbagai mata uang lain.

Persoalan mata uang memang menjadi masalah pelik bagi negara yang masih bergulat dengan kemiskinan tersebut. Pada periode 2006-2009, mata uang resmi negara tersebut, Dollar Zimbabwe (Zimbabwean Dollar/ZWD) terjun bebas nilainya. Nilai mata uang Dollar Zimbabwe turun hingga untuk mendapatkan 1 Dolar Amerika Serikat, dibutuhkan 35 ribu triliun dollar Zimbabwe (35.000.000.000.000.000) atau 35 dengan lima belas angka nol di belakang.

Begitu tidak berharganya mata uang resmi Zimbabwe tersebut hingga akhirnya mata uang tersebut dimonetisasi atau ditarik dari peredaran pada April 2015.

Cerita kegagalan ekonomi Zimbabwe tidak terlepas dari inflasi yang menggila dalam satu dekade terakhir. Menurut catatan Prof Steve H. Hanke –Professor Ekonomi dari The Johns Hopkins University, Maryland Amerika Serikat—Zimbabwe pernah mengalami inflasi bulanan hingga 79.600.000.000 persen pada November 2008. Pada saat itu, harga-harga di pasaran naik dua kali lipat dalam tempo 24 jam. Kondisi ini menempatkan Zimbabwe pada posisi kedua rekor hiperinflasi tertinggi sepanjang sejarah dunia.

Kondisi ini tentu saja langsung membuat kondisi ekonomi negara tersebut kolaps. Jutaan rakyat Zimbabwe jatuh dalam jurang kemiskinan, banyak lainnya memilih untuk meninggalkan negara tersebut, eksodus ke negara lain dengan pengharapan lebih baik.

Kengerian akibat inflasi memang bukan catatan di kertas semata. Banyak contoh di dunia nyata, inflasi bisa membuat kekacauan di berbagai sektor. Tengok saja kondisi di Venezuela pada tahun 2015 yang terus berlanjut pada awal 2016. Pada 2015, inflasi Venezuela tercatat mencapai 159 persen. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan tingkat inflasi di negara kaya minyak tersebut akan terus meroket menjadi 480 persen pada tahun 2016 dan bisa bablas ke 1.640 persen di 2017.

Dampaknya nyata di lapangan. Kengerian dimana-mana. Supermarket-supermarket di negara tersebut kekurangan stok bahan pokok. Masyarakat yang hendak membeli pun harus antri puluhan hingga ratusan meter panjangnya di depan meja kasir.

Beberapa toko yang lebih kecil pun harus jadi korban penjarahan masyarakat yang kekurangan makanan. Pemerintah pun mengambil kebijakan ekstrim seperti melakukan pemadaman listrik secara reguler, memajukan zona waktu pekerja pemerintah agar bisa menghemat listrik. Bahkan wanita di negara ini dihimbau untuk tidak menggunakan *hair dryer* atau pengering rambut elektrik agar konsumsi listrik bisa ditekan seminim mungkin.

*Chaos* terjadi di hampir seluruh penjuru negara. Tingkat pembunuhan meningkat tajam. Hingga akhirnya Presiden Venezuela, Nichola Maduro mengumumkan negara dalam kondisi darurat. Penerus mendiang Presiden Hugo Chaves ini pun terancam kehilangan jabatannya sebagai pemimpin tertinggi negeri sosialis tersebut.

Pemimpin negara di seluruh dunia memang sudah bersepakat bahwa inflasi merupakan musuh bersama yang harus diperangi. Bukan hanya di negara-negara berkembang, negara-negara maju pun juga berusaha sekuat tenaga menekan inflasi serendah mungkin untuk membuat rakyatnya sejahtera. Mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan bahkan pernah mengibaratkan inflasi laksana penyamun yang siap menguras harta masyarakat secara diam-diam.

Indonesia pun pernah mengalami pahitnya masa-masa inflasi tinggi menggerogoti sendi perekonomian negara. Pada sekitar 1960-an, Indonesia sempat mengalami inflasi yang meroket hingga 650 persen. Kala itu, masyarakat susah mendapatkan bahan pangan. Nasi dari beras saja bisa menjadi barang mewah untuk dikonsumsi kala itu. Gantinya, masyarakat miskin memilih konsumsi nasi aking yang lebih terjangkau, meski rasanya jauh dari kata enak.



Pemerintah negara ini pun tentunya tidak ingin kondisi tersebut terulang. Berbagai langkah diambil untuk mengendalikan inflasi serendah mungkin, agar rakyat tidak sengsara, tidak lagi harus makan nasi aking yang keras dan hampir tak ada nilai gizinya.

Koordinasi dirajut, berbagai *stakeholder* di bidang ekonomi dilibatkan untuk merumuskan formula penekan inflasi. Pemerintah yang menggawangi kebijakan fiskal dan Bank Sentral --Bank Indonesia—yang bertanggung jawab di bidang moneter, bergandengan erat mencari cara agar inflasi bisa dikontrol, tak melesat bak roket.

Di tingkat pusat, pemerintah merumuskan dibentuknya Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi. Pada tahun 2005, tim ini mulai diinsiasi. Awalnya hanya di tingkat pusat.

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 2008, kelembagaan tim ini diperluas di tingkat daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Perluasan kelembagaan ke tingkat daerah ini tidak terlepas dari fakta bahwa terdapat banyak kota yang menjadi dasar perhitungan inflasi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini mengambil sampel dari 82 kota untuk perhitungan inflasi. Dari 82 kota tersebut, sebesar 79,85% bobot Indeks Harga Konsumen (IHK)

disumbang oleh daerah yang berada di luar Ibukota DKI Jakarta.

Hal ini menggambarkan besarnya peranan Pemerintah Daerah dalam menyukseskan target sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil.

Pada Juli 2011, semua TPID disatukan dalam payung koordinasi Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID, dengan keanggotaan meliputi Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri. Kelompok kerja ini diharapkan menjadi katalisator yang memperkuat efektivitas peran TPID.

Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID ini terbentuk atas Nota Kesepahaman (MoU) Nomor MOU-01/M.EKON/03/2011, 13//GBI/DKM/NK 300-194 Tahun 2011. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, pada penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Jakarta-Jabar-Banten tanggal 14 Juli 2011 ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara ketiga pihak tersebut yang menandai terbentuknya Pokjanas TPID.

Keanggotaan TPID di tingkat daerah menyerap berbagai unsur seperti instansi pemerintahan daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian di Pemerintah Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Perum Bulog, BUMD, serta

pihak terkait lainnya yang dirasa bisa menciptakan sinergi untuk mengkoordinasikan kebijakan serta kegiatan dalam kerangka stabilitas harga.

Tugas utama tim ini adalah mengkoordinasikan segala hal dalam rangka pengendalian inflasi, baik mengevaluasi tiap faktor pendorong inflasi hingga merumuskan rekomendasi dalam rangka pengendalian faktor-faktor tersebut.

## PUSAT KENDALI INFLASI DI JAWA TIMUR

Sebagai salah satu daerah yang menjadi pemasok komoditas pertanian pangan terbesar di Indonesia, Jawa Timur sudah barang tentu memperoleh perhatian khusus dalam kaitannya dengan kestabilan pasokan bahan pangan yang bermuara pada pengaruh naik turunnya tingkat inflasi nasional. Belum lagi fakta bahwa provinsi di ujung timur Pulau Jawa ini menjadi gerbang perdagangan dengan kawasan Indonesia Timur yang sedang berkembang pesat, menjadikan Jawa Timur ibarat jangkar bagi pengendalian kestabilan inflasi di tingkat nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Jawa Timur menyumbang bobot Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 10,44% dan menjadi bobot terbesar ketiga setelah DKI Jakarta (20,15%) dan Jawa Barat (18,51%). Untuk itu diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas harga barang dan jasa secara umum.

Koordinasi yang lebih komprehensif dan sistematis pun dituangkan dalam kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk TPID Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur sejak 2008.

Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Timur (TPID Jatim) diawali dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bank Indonesia dengan Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Mei 2008 tentang Kerjasama Pengembangan Ekonomi di Jawa Timur, yang terdiri dari upaya pembentukan lembaga TPID, pengembangan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), Investor Relation Unit (IRU) dan program pertukaran data dan informasi. Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, selanjutnya kelembagaan TPID Jatim dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/433/KPTS/013/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta Data dan Informasi Ekonomi Jawa Timur.

Surat keputusan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas Tim ini diperbarui setiap tahun dan terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/59/KPTS/013/2016 tanggal 23 Januari 2016 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Timur.

### TIM YANG BERANGGOTAKAN DINAS/INSTANSI TERKAIT, BERPERAN DALAM HAL:

- 1 Penanganan pasokan dan distribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- 2 Mengevaluasi dan mengidentifikasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi;
- 3 Merekomendasikan kebijakan untuk pencapaian inflasi baik kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat;
- 4 Memantau pelaksanaan kebijakan serta mendiseminasikan upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan ekspektasi masyarakat.

Struktur organisasi TPID Jawa Timur dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Pengarah adalah Gubernur Jawa Timur dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Tim ini terus bekerja simultan, berkoordinasi secara intens untuk menjembatani proses pertukaran informasi antar lembaga melalui Rapat Teknis maupun *High Level Meeting* antar anggota. Kerja ini berujung pada terus berkurangnya asimetri informasi antar instansi dan meningkatkan koordinasi dalam merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan dan bermanfaat.

Beberapa hasil rekomendasi seperti Upaya Antisipasi Dampak Anomali Iklim El Nino, dan Operasi Pasar Bantuan Ongkos Angkut, telah ditelurkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga ketersediaan pasokan sehingga mampu meredam gejolak harga yang lebih tinggi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

TPID Jawa Timur juga tercatat berhasil dalam kerjanya, tercermin dari realisasi inflasi Jawa Timur tahun 2015 sebesar 3,08% yang lebih rendah daripada inflasi nasional yang tercatat 3,35%. Keberhasilan yang harus terus dipertahankan dengan kerja apik dari kumpulan pengambil kebijakan. Tujuan akhirnya tentu saja masyarakat yang sejahtera. ■





# Bersiasat Hadapi Anomali Musim

Anomali iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat sektor pertanian. Hasil panen bisa berantakan. TPID Jatim melakukan banyak siasat antisipasi. Upaya memastikan panen tak terhambat, sehingga pasokan tak terlambat.

**K**HALAYAK tentunya sudah mahfum bahwa anomali iklim akan membuat petani pusing kepala. Hasil panen yang sudah diprediksi bisa jeblok dalam sekali pukul. Ujung-ujungnya petani bakal menderita karena hasil panen tak sesuai harapan. Untuk mengembalikan modal di awal musim panen pun acap kali mereka tak mampu. Hasil akhirnya, petani terbelit hutang di pengijon atau lembaga keuangan.

Anomali iklim memang telah beberapa kali menerjang negeri ini. Yang paling baru tentu saja datangnya fenomena El Nino di sepanjang tahun 2015 lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeskripsikan El Nino sebagai suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut (*sea surface temperature-SST*) di Samudera Pasifik sekitar equator (*equatorial pacific*) khususnya di bagian tengah dan timur (sekitar pantai Peru). Karena lautan dan atmosfer adalah dua sistem yang saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang pada akhirnya berakibat pada terjadinya penyimpangan iklim.

Zaman dahulu, ketika teknologi masih belum banyak diterapkan, datangnya anomali iklim kerap kali tak bisa diprediksi, tak bisa dicegah dan membuat efek destruktif berkepanjangan.

Pun demikian yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Anomali iklim akibat fenomena El Nino menghantam negeri agraris ini.

Berbagai dampak yang dapat timbul akibat kekeringan antara lain menurunnya persediaan air, baik air permukaan dan air tanah, terganggunya pola tanam, pertanaman mengalami puso, meningkatkan serangan organisme perusak tanaman (OPT) hingga kebakaran hutan. Fenomena yang mulai melanda sejak Juni itu juga berakibat pada mundurnya awal musim hujan pada 2015 sampai 2016.

Kemungkinan terjadinya suhu yang kering ditambah tidak adanya hujan cukup besar utamanya dirasakan daerah yang berada di selatan khatulistiwa. Yakni, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kalau pengaruh ini terus menguat pertanian bisa gagal panen. Lahan pertanian tidak ditanami karena tidak ada air kira-kira sampai enam bulan ke depan, dan akan semakin kuat di akhir tahun.



# SRI

## System Rice Intensification

Teknik budidaya padi yang mampu meningkatkan produktifitas padi dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara.

Metode ini terbukti telah berhasil meningkatkan produktifitas padi sebesar 50%, bahkan di beberapa tempat mencapai lebih dari 100%.

Bagi petani, kondisi seperti ini dinilai sangat merugikan. Mundurnya awal musim hujan akan mempengaruhi pergeseran musim tanam dan berpotensi menurunkan produktivitas pertanian Jawa Timur. Saat produktivitas pertanian merosot, penghasilan petani tentunya juga akan seret.

Rendahnya produksi pertanian pada gilirannya akan menyebabkan stok barang di pasar menjadi berkurang hingga mengakibatkan kenaikan harga. Ujungnya, inflasi akan terkerek. Apalagi ini menyangkut kelompok bahan makanan yang menjadi komponen utama penyumbang inflasi.

Bagi petani seperti Syarif Wahyudi kondisi seperti ini memang cukup menyita pikiran. Namun dengan strategi pengolahan lahan, dampak negatif El Nino bisa diminimalkan.

Petani asal Kabupaten Malang ini telah menerapkan *System Rice Intensification* (SRI). Dengan menerapkan SRI tersebut hasil panen lebih banyak dan masa panen juga lebih cepat dari sistem biasa karena pengelolaan pertanian benar-benar intensif, mulai dari pemilihan benih unggul, penggunaan pupuk berimbang serta sistem penanaman yang menggunakan jarak legowo.

Di Kabupaten Malang sendiri, hampir setiap kecamatan sudah menerapkan sistem ini. Dengan cara itu, produktifitas padi di harapkan mencapai 7,5 ton per hektare gabah kering panen (GKP). Produktivitas lahan sebesar itu meningkat 17 persen bila dibandingkan rata-rata produktivitas padi tahun lalu, bahkan pada panen raya padi di Kecamatan Tumpang beberapa waktu lalu produktivitasnya mencapai 8,8 ton per hektare GKP.

SRI yang dimaksud Syarif adalah teknik budidaya padi yang mampu meningkatkan produktivitas padi dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara. Metode ini terbukti telah berhasil meningkatkan produktifitas padi sebesar 50%, bahkan di beberapa tempat mencapai lebih dari 100%.

Uji coba pola SRI pertama di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Sukamandi, Jawa Barat pada musim kemarau 1999 dengan hasil 6.2 ton/ha dan musim hujan 1999/2000 dengan hasil rata-rata 8.2 ton/ha.

Kelebihan SRI diantaranya hemat air, hemat biaya (butuh benih 5kg/ha, tidak butuh biaya pencabutan bibit, tidak butuh biaya pindah bibit, tenaga tanam berkurang dll), hemat waktu (ditanam bibit muda 5-12 hari setelah semai, panen lebih awal) dan tentunya produksi dipastikan bisa meningkat, di beberapa tempat mencapai 11 ton/ha.

Sementara itu, Jajar Legowo merupakan sistem penanaman yang mengatur jarak antar benih pada saat penanaman benih padi. Pola penanamannya yaitu membuat beberapa barisan tanaman yang kemudian diselingi satu barisan kosong. Tanaman yang seharusnya ditanam pada barisan yang kosong dipindahkan sebagai tanaman sisipan di dalam barisan.

Sistem tanam ini mampu memberikan sirkulasi udara dan pemanfaatan sinar matahari lebih optimal untuk pertanaman. Kelebihan lainnya, upaya penanggulangan gulma dan pemupukan dapat

dilakukan dengan lebih mudah. Dalam satu hektar, biasanya hanya mampu menanam sebanyak 250.000 tanaman, namun dengan Jajar Legowo, jumlah tanaman yang bisa ditanam mencapai 330.000 tanaman. Sehingga hasil produktivitas lahan tentu meningkat.

Dalam mendorong terjaganya produksi ditengah El Nino, TPID Jawa Timur terus berupaya menjaga produktivitas melalui Teknologi Efisiensi dan Konservasi Air, Pengembangan Varietas Tahan Kekeringan, Bantuan Benih, Pupuk dan Alsintan. Pengarah TPID Jatim, Benny Siswanto mengatakan BI dan seluruh jajaran instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tergabung ke dalam TPID Jawa Timur, terus melakukan berbagai langkah inovatif melalui berbagai program pengendalian inflasi Jawa Timur, sehingga masyarakat diharapkan tidak terlalu khawatir dan panik dalam merespon isu-isu terkait gejolak harga komoditas yang justru dapat dimanfaatkan spekulasi untuk mendorong kenaikan harga. ■



# Menyambung Temali Petani dan Korporasi

TPID Jawa Timur dengan berbagai elemen di dalamnya menyinergikan salah satu BUMD Provinsi Jatim dengan koperasi petani. Petani lebih mudah mendapat modal dan jangkauan pemasaran.

**P**ERMODALAN memegang peranan penting bagi sebuah koperasi, termasuk Koperasi Petani. Dengan permodalan yang memadai, koperasi bisa menyerap lebih banyak komoditas yang dihasilkan petani. Kondisi inilah yang dirasakan kebenarannya oleh Koperasi Pertanian (Koptan) Sumber Rejeki di Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Dulunya, Koptan ini hanya bisa membeli komoditas hasil panen petani di sekitar Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro dalam jumlah terbatas karena keterbatasan modal. Padahal wilayah tersebut merupakan penghasil jagung yang cukup melimpah.

"Sebelumnya, modal kami terbatas. Dalam satu musim panen, paling hanya sekitar Rp 30 jutaan. Modal sebesar itu hanya bisa membeli sekitar 7 kg jagung dari petani," kata Ketua Koptan Sumber Rejeki, Sulis.

Baru sekitar dua tahun ini koperasi yang dipimpinnya berkenalan dengan Puspa Agro. Berkat kerjasama dengan salah satu BUMD Provinsi Jatim ini, permodalan koperasi jadi berlipat-lipat. Dalam satu kali musim panen sekarang bisa memiliki modal sampai Rp 100 juta berkat pinjaman dari Puspa Agro. Bagi koperasi sendiri, dalam satu kali musim panen jagung omzetnya bisa mencapai Rp 1,5 miliar.

Selain masalah permodalan, koperasi juga bisa lepas dari ketergantungan dengan tengkulak untuk menjual komoditas yang dihimpunnya dari petani. "Sejak kerjasama dengan Puspa Agro, kami dihubungkan dengan rekanan Puspa Agro yang membeli jagung dengan harga beli yang lebih baik dibandingkan dulu saat dengan tengkulak. Pembayarannya juga lebih cepat, begitu barang masuk gudang, langsung dibayar. Tidak seperti dengan tengkulak yang pembayarannya bisa mundur berbulan-bulan sehingga menyebabkan perputaran uang kami terhambat," tuturnya.

Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin menambahkan, apa yang dilakukan Puspa Agro merupakan langkah untuk membantu petani. Sejak pertengahan 2014, salah satu perusahaan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini telah meluncurkan divisi trading house. Muchibuddin menuturkan, divisi *trading house* memiliki dua tujuan yaitu memperpendek rantai distribusi. Dengan pola distribusi yang lama, dari petani, komoditas masih harus melalui tengkulak, pedagang besar, distributor besar dan lain-lain. Sekarang dari petani bisa langsung diterima Puspa Agro.

Pendeknya jalur distribusi bermanfaat bagi dua belah pihak. Bagi petani, ada nilai tambah 25-40 persen ketika produknya langsung dibeli Puspa Agro dibandingkan saat melalui tengkulak.

Sedangkan bagi konsumen, karena jalur distribusi menjadi lebih pendek, maka harga suatu barang pun bisa ditekan. Tentunya konsumen akan diuntungkan karena harga menjadi lebih murah.

Yang kedua, dengan adanya *trading house* ini juga bisa menjadi *buffer stock* dan stabilisator harga untuk beberapa komoditas petani. Salah satu contoh Puspa Agro melakukan stok untuk beberapa komoditas petani, peternak dan nelayan yang rawan atas naik turunnya harga. Saat harga naik Puspa Agro melepas komoditas untuk kepentingan stabilisasi harga pasar.

Melalui jaringan pasar yang kuat dan luas, semua lini divisi *Trading House* terus bergerak dan bermitra dengan kelompok-kelompok tani atau gabungan kelompok tani dan peternakan (*gapoktan*) di sentra-sentra produksi agribis. Hingga saat ini kapasitas *cold storage* divisi *trading house* Puspa Agro mencapai 450 ton.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemilahan (*grading*) di sentra *gapoktan* yang berdasar kualitas dan pengemasan, komoditas pilihan itu lalu didistribusikan ke pasar-pasar modern, pabrikan atau perusahaan makanan olahan, bahkan untuk memenuhi pasar ekspor.

Saat diuji-coba pertengahan 2014 lalu, serapan terhadap hasil panen petani, nelayan, dan peternak baru mencapai 780 ton dengan nilai transaksi Rp 14,37 miliar. Tahun 2015 capaian itu meningkat drastis menjadi Rp 78 miliar dari total volume 5.485 ton. Dan, tahun 2016 ini dipastikan kembali meningkat, karena hingga satu semester saja (Januari-Juni), serapan *trading house* telah mencapai 9.677 ton dengan nilai Rp 83,98 miliar.

Hingga akhir tahun ini, serapan Puspa Agro dari divisi *trading house* diprediksi melampaui Rp 150 miliar.



Selain itu, Puspa Agro juga melakukan terobosan pemasaran melalui kerja sama strategis dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Kerja sama pemasaran ini sekaligus sebagai perluasan pangsa pasar, karena baik Puspa Agro maupun Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memiliki segmen dan sasaran pasar yang beragam.

Langkah Puspa Agro dalam memaksimalkan serapan hasil panen petani melalui *trading house*-nya tidak sia-sia. Saat diuji-coba pertengahan 2014 lalu, serapan terhadap hasil panen petani, nelayan, dan peternak baru mencapai 780 ton dengan nilai transaksi Rp 14,37 miliar. Tahun 2015 capaian itu meningkat drastis menjadi Rp 78 miliar dari total volume 5.485 ton. Dan, tahun 2016 ini dipastikan kembali meningkat, karena hingga satu semester saja (Januari-Juni), serapan *trading house* telah mencapai 9.677 ton dengan nilai Rp 83,98 miliar. Hingga akhir tahun ini, serapan Puspa Agro dari divisi *trading house* diprediksi melampaui Rp 150 miliar.

TPID Jatim sendiri terus mendorong peningkatan peran Bulog-

mart dan Puspa Agro (BUMD) sebagai lembaga *buffer* pada saat *excess supply* dan menjadi distributor pada saat *shortage*, agar kontinuitas pasokan tetap terjaga.

Dalam rangka Penguatan Kelembagaan: Kerjasama Antar-daerah Melalui BUMD dalam Rakorwil TPID se-Jatim diberikan rekomendasi jangka pendek untuk mendorong optimalisasi peran BUMD yang bergerak di bidang komoditas, yaitu melalui optimalisasi fungsi BUMD sebagai *buffer/fasilitator* perdagangan antar daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga, mendorong terselenggaranya PKS BUMD Kab/Kota dengan Puspa Agro. Diusulkan, BUMD bisa menyerap hasil pertanian dari Gapoktan/Produsen dan kapasitas modal/pembiayaan dapat dibantu dari Perbankan.

Sedangkan untuk jangka panjang akan dilakukan penguatan fungsi BUMD sebagai lembaga *buffer/stabilitator* harga, yaitu dengan penguatan infrastruktur BUMD Kab/Kota dari segi SDM, Teknologi Informasi dan pergudangan serta penguatan kapasitas permodalan BUMD kab/kota dan Puspa Agro. ■

# Satu Informasi agar Pedagang Culas Tak Main Harga Sendiri

Pemprov Jatim melakukan inovasi dengan pendekatan teknologi informasi untuk memangkas *asymmetric information* di bidang perdagangan komoditas. Efektif menutup celah pedagang yang berniat seenak hati memainkan harga sendiri.



**S**EMBARI menonton tayangan sepakbola favoritnya di situs berbagi video *Youtube*, Muhammad Ilham kini bisa menjawab dengan cepat pertanyaan istrinya soal harga bahan kebutuhan pokok di kotanya. Pegawai di sebuah perusahaan rokok di Kediri ini sekarang hanya perlu melakukan beberapa kali klik tetikus dan mengetik beberapa kata kunci di tuts papan ketik untuk mengetahui harga beras, gula, tepung hingga susu kental manis yang jadi barang dagangan di toko kelontong milik keluarganya tersebut.

Adalah situs [www.siskaperbapo.com](http://www.siskaperbapo.com) yang menjadi jujukan bapak dua anak tersebut sebelum berangkat mengantar istrinya berbelanja kebutuhan toko kelontongnya. Melalui situs yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur tersebut, Ilham dan banyak masyarakat lain di seantero Jawa Timur bisa memantau pergerakan harga bahan pokok yang kerap berubah tiap hari.

Siskaperbapo sendiri adalah kependekan dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok. Datanya

diperoleh dari 116 pasar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur

Khusus ketika momen-momen tertentu seperti bulan puasa, situs ini menjadi penolong bagi banyak masyarakat yang membutuhkan informasi cepat, *realtime*, dan akurat mengenai harga kebutuhan barang kebutuhan pokok. Ilham dan ribuan pedagang kecil lain di Jawa Timur kini bisa tahu di pasar mana harga sebuah komoditas sedang naik atau turun, dimana pasar yang harga bahan pokoknya paling murah sehingga cocok menjadi lokasi *kulakan*.

SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan Dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) memang ditelurkan untuk mengatasi kesenjangan informasi harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur. Melalui sistem ini masyarakat bisa memantau harga dengan cepat, tanpa harus datang ke masing-masing pasar.

Bagi yang tidak mempunyai koneksi internet seperti Ilham, sistem ini juga menyediakan informasi harga melalui *short message service* (SMS) yang tentunya akan mudah diakses melalui ponsel berharga murah sekalipun. Cukup kirim SMS dengan format tertentu ke SMS Center.



Informasi yang asimetris menjadi krusial untuk diperhatikan karena bisa menjadi celah masuknya pihak-pihak yang mengambil keuntungan atas hal itu. Mereka yang mendapatkan informasi akurat akan lebih mudah mengambil keputusan. Bagi pedagang, perbedaan informasi yang didapat tentu bisa dijadikan celah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya atas mereka yang minim informasi, mengenai harga komoditas misalnya.

Hajat besar dari implementasi sistem ini adalah tiadanya lagi informasi yang asimetris (*asymmetric information*) di masyarakat khususnya yang bertempat tinggal jauh dari kota atau kabupaten yang menjadi pusat ekonomi. Harapannya, informasi yang didapatkan mereka yang tinggal di Surabaya akan sama dengan mereka yang tinggal di Pacitan atau Banyuwangi.

Informasi yang asimetris menjadi krusial untuk diperhatikan karena bisa menjadi celah masuknya pihak-pihak yang mengambil keuntungan atas hal itu. Mereka yang mendapatkan informasi akurat akan lebih mudah mengambil keputusan. Bagi pedagang, perbedaan informasi yang didapat tentu bisa dijadikan celah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya atas mereka yang minim informasi, mengenai harga komoditas misalnya.

Dan SISKAPERBAPO hadir untuk mengeliminir jurang tersebut. Kini pedagang atau konsumen di Pacitan akan tahu dengan akurat harga di Surabaya, atau di kota kabupaten sekelilingnya seperti Ponorogo, Madiun, Trenggalek atau bahkan di banyuwangi yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Para pedagang kecil atau konsumen kini tidak akan mudah diperdaya pedagang-pedagang besar culas yang mematok harga seenak perutnya sendiri.



# Perkuat Produksi dan Daya Saing Petani lewat Cooperative Farming

Para petani di Jawa Timur didorong untuk membangun model *cooperative farming*. Petani secara bersama-sama membangun daya saingnya. Pemerintah menjembatani lewat beragam fasilitasi sesuai keunggulan masing-masing kelompok tani.

Sejak diperkenalkan 2012 silam, SISKAPERBAPO kini terus dibe-nahi. Makin banyak komoditas yang ditambahkan dalam daftar informasi harga. Semakin luas jangkauan pasar yang disurvei. Kini ada sedikitnya 116 pasar di 38 kabupaten/kota yang dipantau har-ganya setiap hari. Masing-masing Kabupaten/Kota diwakili oleh 2-5 pasar utama. Dinas Perdagangan di tiap Kabupaten/Kota di seluruh Jatim digerakkan untuk menyumbang data yang dibutuh-kan masyarakat.

Bukan hanya harga ritel untuk konsumen yang dipajang. Harga kulakan pedagang di sentra-sentra komoditas perdagangan kini dipajang. Ambil contoh harga Bawang Merah di Pasar Dlinggu Probolinggo dan Pasar Pasar Sukomoro Nganjuk, harga beras di Pasar Bendul Merisi Surabaya dan UD Hasil Tani Probolinggo bisa dipantau tiap hari. Harga daging sapi dipantau langsung dari Rumah Potomongan hewan (RPH) Pegirian Surabaya, RPH Krian Sidoarjo dan RPH Kota Malang. Harga Ayam Potong dipantau ha-rian dari Peternak di Desa Kambangan Kediri serta Pasar Gringging Kediri. Dan masih banyak komoditas lain dipantau dari pusat dis-tribusi utamanya.

Komoditas yang dipantau pun terus diperkaya ragamnya. Kini ada total 68 variasi komoditas yang dipantau meliputi beras, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, ja-gung pipilan, garam, tepung terigu, kacang kedelai, mie instant, aneka cabai, aneka bawang, ikan asin teri, kacang hijau, kacang tanah, ketela pohon, kol/kubis, kentang, tomat, wortel, buncis, se-men, aneka ikan, benih padi, benih jagung, benih kedelai, kayu ba-lok, papan, besi beton, paku, LPG 3 kg dan aneka pupuk.

Di balik layar, penguatan juga terus dijalankan. Forum koordi-nasi rutin dilaksanakan. Setidaknya 3 (tiga) bulan sekali adminis-trator SISKAPERBAPO di 38 Kab/Kota diundang untuk mengiden-tifikasi masalah, melakukan evaluasi, sampai mencari solusi agar data yang tersedia akurat dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi *early warning indicator* dan bahan pengambilan kebijakan yang tepat di masing-masing *stakeholder*.

Tujuan akhirnya tentu saja agar tidak ada lagi *panic attack* di suatu daerah akibat lonjakan harga komoditas yang tiba-tiba dan tak berdasar. Kepanikan yang kerap kali bisa melambungkan inflasi suatu daerah aki-bat info tak berdasar yang dijadikan acuan harga di pasaran. ■

**B**AGI Hudi, menjadi petani di masa sekarang jauh lebih mudah dibandingkan 10 tahun silam. Petani asal Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jom-bang, Jawa Timur ini merasakan betul bagaimana su-sahnya dulu menggantungkan hidup di bidang pertanian.

Masih hangat di ingatannya, bekapan tengkulak membuat ba-nyak petani di desanya tidak pernah merasakan indahnya musim panen. Tengkulak, atau yang di kampungnya dikenal dengan is-tilah penebas, menjadikan petani ibarat berada dalam lingkaran setan, menyakitkan namun bikin kecanduan. Bagaimana tidak, dengan iming-iming modal pertanian, petani siap menggandai-kan hasil panennya kepada para tengkulak ini. Sialnya, dengan harga jual yang murah.

Kondisi ini terus berulang tiap musim tanam tiba. Bagi petani seperti Hudi, untung sedikit tak apa, yang penting terus bercocok tanam. Jangankan berpikir bagaimana meningkatkan produksi padi, bisa tanam di musim berikutnya saja, petani di Pojokkulon dulu sudah bersyukur.

Bukan hanya jerat tengkulak yang menjadi momok bagi Hudi

dan rekan-rekannya sesama petani. Kini, masalah bertambah pelik dengan sulitnya mencari pekerja untuk mengerjakan proses ta-nam hingga panen. Kini tak banyak anak muda yang mau beker-ja di sawah. Jadi buruh pabrik mereka anggap lebih bergengsi. Akibatnya para petani kesulitan mencari pekerja. Kalaupun ada, usianya sudah tua dan minta bayaran mahal.

Masalah bertubi-tubi yang hadir tak lantas membuat Hudi dan rekan-rekannya patah semangat. Beberapa tahun belakangan, te-patnya sejak 2012, Hudi dan petani yang tergabung dalam Gapok-tan Pojokkulon mendapat bantuan dari Bank Indonesia (BI).

“Rangkaian program ini diawali dengan program Pengembang-an Usaha Agribisnis Perdesaan dari Dinas Pertanian.”

Program itu, kata Hudi, berhasil mengakomodasi kepentingan petani. Kepastian pasokan benih, pupuk hingga sistem pemasaran yang memastikan serapan berhasil membuahkkan fokus di kalang-an petani.

Keberhasilan program dari BI pun terus berlanjut dengan berba-gai program pembinaan dari Dinas Pertanian. Kini yang paling baru, Hudi dan petani Pojokkulon lainnya mendapat pembinaan dari

Dinas Pertanian untuk mengadopsi model pengembangan *Cooperative Farming*.

*Cooperative Farming* dilaksanakan dengan model pemberdayaan kelompok tani melalui rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah.

Di lapangan, *Cooperative Farming* dilaksanakan dengan beberapa implementasi seperti pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil dilakukan oleh satu manajemen dalam kelompok, pelaksanaan usaha tani mengacu pada teknologi kesepakatan bersama oleh anggota kelompok tani berdasarkan masukan dari peneliti/penyuluh dan pengalaman petani, serta kegiatan *off farm* dilakukan oleh anggota kelompok tani didasarkan peluang, kekuatan dan sumberdaya pertanian yang ada di daerah setempat.

Secara umum *Cooperative Farming* bermakna kegiatan konsolidasi pengelolaan lahan untuk mencapai efisiensi usaha tani. Sistem pertanian kooperatif ini mensyaratkan batas minimal lahan seluas 50 ha dan dikelola berdasarkan kesepakatan pemilik lahan. Selanjutnya untuk permodalan, penyediaan saprodi dan sarana mekanisasi, pengolahan hasil serta pemasaran dikelola secara korporasi. Semua kegiatan tersebut (*on farm* dan *off farm*) dikelola oleh seorang manajer secara profesional yang bekerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintah.

Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Pertanian pun turut mengimplementasikan model kerjasama ini untuk mendongkrak produksi tanaman pangan di wilayah Jatim. Setidaknya 29 kabupaten di Jatim kini sudah mengembangkan model *cooperative farming* yang sesuai dengan komoditas andalan di masing-masing kabupaten tersebut. Jumlah kelompok tani yang mengimplementasikan model ini juga terus bertambah.

Para kelompok tani tersebut melakukan berbagai aktivitas seperti pengelolaan lahan dan air irigasi; pengelolaan tenaga kerja; pengelolaan tanaman dan teknologi budidaya; pengelolaan saprodi dan alsintan; pengelolaan modal kelompok dan pengelolaan panen/pasca panen dan pemasaran.

Melalui kerjasama ini, berbagai hambatan seperti minimnya tenaga kerja atau sulitnya pengelolaan lahan dan mendapatkan air irigasi bisa dieliminasi guna meningkatkan produktivitas dan keuntungan petani.

Bagi petani, dari hasil evaluasi umum, ada beberapa manfaat ekonomi dari penyelenggaraan *cooperative farming* di beberapa kabupaten di Jatim. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:



Hingga tahun 2016 jumlah Kelompok *Cooperative farming* di Jawa Timur adalah sebagaimana Tabel berikut

NO	KABUPATEN	JML KELP. CF (UNIT)
1	Pacitan	6
2	Ponorogo	4
3	Trenggalek	4
4	Tulungagung	6
5	Blitar	6
6	Kediri	5
7	Malang	7
8	Lumajang	7
9	Jember	5
10	Banyuwangi	6
11	Bondowoso	5
12	Situbundo	4
13	Probolinggo	5
14	Pasuruan	6
15	Sidoarjo	4
16	Mojokerto	9
17	Jombang	7
18	Nganjuk	4
19	Madiun	8
20	Magetan	4
21	Ngawi	8
22	Bojonegoro	8
23	Tuban	5
24	Lamongan	10
25	Gresik	5
26	Bangkalan	4
27	Sampang	5
28	Pamekasan	2
29	Sumenep	5
<b>Jumlah Jawa Timur</b>		<b>164</b>

- ★ **PERTAMA**, efisiensi produksi. CF telah meningkatkan efisiensi khususnya dalam penggunaan tenaga kerja dan mesin pertanian.
- ★ **KEDUA**, meningkatkan *negotiation power*. Dengan model ini baik dalam pemasaran hasil komoditas maupun pembelian bermacam saprotan dan barang investasi, *negotiation power* petani akan meningkat karena dilakukan secara kelompok.
- ★ **KETIGA**, terciptanya efisiensi dan efektivitas manajemen. Pengelolaan hamparan secara umum dilakukan oleh seorang manajer profesional yang dalam prakteknya semua kegiatan dimusyawarahkan sebelumnya dengan para anggota.
- ★ **KEEMPAT**, aktivitas *nonfarm*. Bila efisiensi dari tenaga kerja tercapai, maka curahan waktu tenaga kerja yang berlebih dapat dialihkan untuk berbagai macam kegiatan *nonfarm* guna memperoleh tambahan penghasilan.

- ★ **KELIMA**, peningkatan pendapatan.

Adapun manfaat sosial yang diperoleh dari model ini antara lain kegiatan ini memberikan pendidikan bagi masyarakat pedesaan; model ini dapat menjadi ajang pendidikan organisasi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan dalam usaha mencapai tujuan bersama.

*Cooperative farming* juga mampu menghidupkan kembali gairah ekonomi kerakyatan. Dengan terbentuknya sentra-sentra ekonomi pertanian yang tangguh, kegiatan agribisnis akan berjalan, dan pasar akan terbentuk. Model ini akan memberikan efek positif berupa perasaan memiliki dari para anggota, yang akan berlanjut pada komitmen mereka untuk bekerja bersama melalui kelompok.

Dengan demikian cita-cita meningkatkan kuantitas pertanian dan berujung pada peningkatan kualitas hidup petani pun bakal terwujud. ■



# Agar Petani Jadi Manajer di Lahan Sendiri

Pemerintah menciptakan Taman Teknologi Pertanian sebagai sarana unjuk penerapan teknologi ke sektor agraris. Berhasil memancing kaum muda untuk menggeluti sektor yang kerap dinilai minor ini.

**A**NGAN-ANGAN bekerja di negeri orang dengan gaji berlimpah kini sudah dibuang jauh-jauh dari benak Muhammad Lukman. Pemuda 18 tahun yang baru lulus SMA itu kini tak lagi berminat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia seperti yang 15 tahun silam dilakoni ayah dan para pamannya.

Ia kini lebih berminat menjadi petani jagung --profesi yang dulu dihindari kebanyakan pemuda di kampungnya-- di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Adalah H. Solahuddin yang mampu mengubah cita-cita banyak anak muda di Desa Banyubang seperti Lukman.

Keberhasilan H. Solahuddin mengembangkan budidaya Jagung di Solokuro, Lamongan membuat banyak pemuda kini ingin mengikuti jejaknya menjadi petani sukses. Mengembangkan budidaya Jagung di Solokuro memang bukan perkara mudah. Wilayah di pesisir Utara Kabupaten Lamongan ini terkenal sebagai daerah kering yang minim air. Lahan pertanian yang ada pun hanya mengandalkan tadah hujan. Hanya komoditas-komoditas tertentu saja yang bisa tumbuh di daerah ini, salah satunya Jagung dan bebera-

pa tanaman Palawija lainnya.

Awalnya hanya orang-orang tua yang berminat menjadi petani disini. Hal ini lantaran hasilnya sangat minim. Para pemudanya lebih memilih bekerja kasar diluar negeri dengan iming-iming gaji sekitar 4 kali standart UMK di kampungnya. Rata-rata tujuannya perkebunan Sawit di Malaysia.

Berkat kegigihan H. Solahuddin lahan pertanian di Solokuro bisa dikenal di seantero negeri. Tekad kuat lulusan Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan ini dalam belajar budidaya jagung menjadikannya mampu mengubah lahan tandus di kampungnya menjadi salah satu lahan pertanian paling maju di Jawa Timur. Berbagai inovasi pertanian yang dipelajari H. Solahuddin di dalam maupun luar negeri diterapkannya dalam pertanian jagung di kampungnya.

Kini, stigma buruk Kecamatan Solokuro sebagai kampung teroris --karena kebetulan menjadi tempat lahir pelaku Bom Bali, Amrozi CS-- diubah 180 derajat olehnya menjadi kampung pertanian maju di Indonesia. Kini banyak petani dari dalam maupun luar negeri belajar dan berguru di kampung tersebut.



#### TTP BANYUBANG LAMONGAN

- luas tanam komoditas jagung 193 hektar
- produksi 4.825 ton/meter
- populasi sapi 320 ekor menghasilkan pupuk organik 1.600 kg per hari

#### Infrastruktur Pendukung

- jalan desa aspal atau beton sepanjang 5.500 meter yang diperkeras,
- makadam sepanjang 3.000 meter
- jalan tanah sepanjang 2.600 meter
- Jalan Usaha Tani 6.000 meter
- lantai jemur 700 meter persegi
- gudang seluas 300 meter persegi.

Pemerintah pun tak luput memberi perhatian khusus pada kampung ini. Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menunjuk Desa Banyubang ini menjadi salah satu dari proyek percontohan Taman Teknologi Pertanian (TTP).

TTP sendiri merupakan kawasan yang berfungsi sebagai tempat penerapan berbagai jenis teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil pasca panen tepat guna dalam skala ekonomi. Tak hanya itu, tempat tersebut juga sebagai

tempat pelatihan dan pusat transfer teknologi ke masyarakat luas serta bisa menjadi lokasi wisata pertanian.

Di TTP Lamongan ini diintegrasikan budidaya komoditas jagung hibrida dengan penggemukan sapi. Integrasi tersebut menghasilkan pola pengembangan pertanian *zero waste* dimana limbah pertanian jagung dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi sementara limbah kotoran sapi dimanfaatkan kembali untuk biogas yang dipakai dalam proses pengeringan hasil panen jagung serta dan pupuk organik berbahan dasar kotoran sapi.

TTP Banyubang Lamongan ini sendiri mempunyai luas tanam komoditas jagung mencapai 193 hektar dengan produksi yang dihasilkan sebanyak 4.825 ton/meter dan populasi sapi sebanyak 320 ekor yang menghasilkan pupuk organik sebanyak 1.600 kg per hari.

TTP ini juga didukung infrastruktur berupa jalan desa aspal atau beton sepanjang 5.500 meter yang diperkeras, makadam sepanjang 3.000 meter, jalan tanah sepanjang 2.600 meter, Jalan Usaha Tani 6.000 meter, lantai jemur 700 meter persegi dan gu-

dang seluas 300 meter persegi.

Berdirinya Taman Teknologi Pertanian ini pun dimanfaatkan secara maksimal oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebagai proyek percontohan serta pusat pengembangan inovasi pertanian yang pada ujungnya mampu menjadi jangkar penguat kestabilan pangan dan harga komoditas pertanian di Jawa Timur.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Wibowo Eko Putro, mengatakan TTP merupakan salah satu solusi pengembangan lahan pertanian kering, dimana lahan jenis ini justru mendominasi di



## Cara Cerdas Rem Gejolak Harga

Upaya mengatasi lonjakan harga tidak melulu harus dengan mengatur penawaran dan permintaan komoditas semata. Ada komponen biaya yang bisa ditekan, atau diintervensi melalui bantuan, yaitu ongkos angkut. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur melakukannya saat mengantisipasi lonjakan harga menjelang puasa dan Lebaran 2015.

wilayah Jawa Timur. Dinas Pertanian mencatat, di Jawa Timur luas lahan kering atau lahan yang hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan, mencapai 1,3 juta hektar. Jumlah ini lebih besar dari luas lahan basahnya—lahan pertanian yang memanfaatkan pengairan dari irigasi— yang mencapai 1,017 juta hektar.

“Penerapan teknologi-teknologi pertanian terkini diharapkan bisa menjadi solusi pengembangan lahan kering agar bisa berproduksi lebih baik. Di Taman Teknologi pertanian inilah diharapkan bisa terjadi sinergi, saling tukar informasi dan ilmu antara petani yang sudah sukses menerapkan teknologi pertanian terkini sehingga harapannya makin banyak petani yang bisa meningkatkan hasil panennya,” kata Wibowo.

Selain di Lamongan, Taman Teknologi Pertanian juga dikembangkan di Pacitan tepatnya di Kecamatan Pringkuwu dimana komoditas yang dikembangkan adalah padi untuk lahan kering atau padi gogo. Pemilihan Pacitan menjadi salah satu lokasi dibangunnya TTP adalah karena di wilayah ini juga sudah mengintegrasikan

pertanian dan peternakan sapi dengan konsep *Zero Waste* seperti yang dikembangkan di Lamongan.

Selain di kedua lokasi tersebut, di masa mendatang, TTP juga akan didirikan di berbagai daerah lain seperti Gresik dan Situbondo yang diplot menjadi daerah percontohan pengembangan pertanian pesisir pantai.

“Bagi petani dan pemerintah daerah, ini bisa direplikasikan di daerah lain. Petani dari manapun bisa belajar disini dan kedepannya mereka bisa menjadi manajer di lahannya masing-masing. Tentu saja dengan melihat spesifik lokasi masing-masing dan kearifan lokal sehingga penerapannya bisa pas di daerah,” kata Wibowo.

Pendirian Taman Teknologi Pertanian ini tentunya menjadi salah satu ikhtiar meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian Jawa Timur di pasar internasional. Tujuan akhirnya tentu saja untuk menjaga keberlangsungan produksi dan nilai tambah petani sehingga terwujud stabilitas harga baik di level produsen maupun konsumen. ■

**B**ERSYUKUR sekaligus waswas selalu dirasakan Mufidah setiap menjelang bulan Ramadan disusul dengan Hari Raya Idul Fitri. Sebagai seorang muslimah, itu adalah saat-saat yang membahagiakan karena dikaruniai panjang umur sehingga berjumpa bulan penuh ampunan.

Namun, ibu dua orang anak masih berumur 2 tahun dan 6 tahun itu juga waswas. Kenaikan harga bahan-bahan pokok seakan sudah menjadi tradisi. Sehingga dia harus berhitung cermat untuk memenuhi kebutuhan belanja harian. Uang belanja dari suami yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Surabaya harus dihemat betul. “Jangan sampai belanja habis Rp 50 ribu per hari, nanti bisa-bisa tidak ada uang pegangan saat hari raya,” ujarnya.

Untunglah kecemasan ibu rumah tangga seperti Mufidah itu sudah diantisipasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur dengan menggelar Operasi Pasar (OP) bantuan

ongkos angkut. Pelaksanaan OP bantuan distribusi ongkos angkut menjelang Ramadan hingga mendekati Lebaran dilakukan secara serentak di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kepala Bidang Dalam Negeri (PDN) Disperindag Jatim Anny Mulyandari Kartini mengatakan, OP dimulai 16 Juni hingga 15 Juli 2015 atau hingga H-2 Lebaran dan dilaksanakan secara serentak di berbagai pasar tradisional kabupaten/kota di Jawa Timur. “Di setiap kabupaten/kota hanya disiapkan satu sampai dua titik di setiap pasar tradisional,” kata Anny Mulyandari Kartini.

Khusus untuk Surabaya, OP dilaksanakan di empat pasar tradisional, yaitu Pasar Wonokromo, Pasar Tambakrejo, Pasar Sopenyono Baru Rungkut, dan Pasar Pucang. OP bantuan ongkos angkut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga yang disebabkan naiknya permintaan beberapa bahan pokok menjelang Puasa dan Lebaran.

Dalam OP, harga beras premium menjadi sebesar Rp8.500/kg, harga gula pasir menjadi Rp11.500/kg, harga tepung terigu menjadi sebesar Rp7.500/kg dan harga minyak goreng menjadi sebesar Rp11.500/kg.

Dengan program OP bantuan ongkos angkut, pemerintah dapat menyediakan harga bahan pokok yang cukup murah, kendati demikian, masyarakat tidak boleh memborong terlalu banyak. "Panitia membatasi setiap pembeli bahan pokok OP cuma 5 kg untuk beras, gula pasir dan tepung terigu masing-masing dua kilogram, dan minyak goreng dua botol kemasan botol satu liter. Ini untuk pemerataan ke semua warga sekaligus memastikan bahwa program ini sampai ke masyarakat, bukan dimanfaatkan pedagang untuk mendapatkan harga murah yang kemudian barangnya dijual lagi," ujar Anny.

Setiap hari, di masing-masing titik OP disediakan beras 750 kilogram, gula pasir 750 kilogram, tepung terigu 500 kilogram, dan minyak goreng 600-750 botol kemasan 1 liter. Untuk OP selama satu bulan disiapkan beras 1.750 ton, gula pasir 1750 ton, tepung 1.400 ton dan minyak goreng 900 ton.

Melalui pelaksanaan program operasi pasar bantuan ongkos angkut ini, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan harga sama dengan harga pabrik yang berdampak pada stabilisasi pembentukan harga. Kemudian pada akhirnya bisa membantu mengendalikan laju inflasi, khususnya pada bahan pokok makanan.

Bank Indonesia menilai strategi operasi pasar (OP) bantuan ongkos angkut di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur melalui Disperindag Provinsi Jawa Timur mampu menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan daya beli masyarakat.

Deputi Bank Indonesia Jatim, Soekowardojo, mengatakan, operasi pasar dan bantuan ongkos angkut ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan TPID Jatim untuk mendorong ketersediaan dan kelancaran pasokan selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis di Jatim sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain kegiatan itu, TPID Jatim bersama jajaran instansi terkait juga melakukan Pasar Murah Ramadhan dan akan melakukan Operasi Pasar Situasional apabila terjadi tekanan harga untuk komoditas pangan strategis lainnya.





# Mudik Gembira dengan Tarif Angkutan Terjangkau Warga

Program mudik gratis Pemprov Jatim membantu masyarakat dalam menghadapi momen Lebaran. Berkontribusi pada upaya pengendalian inflasi yang berujung pada terjaganya daya beli warga.

Strategi lainnya yang dilakukan TPID Jatim adalah percepatan distribusi barang kebutuhan pokok dengan memprioritaskan transportasi angkutan yang mengangkut bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak, tidak membatasi angkutan barang pengangkut kebutuhan pokok untuk beroperasi menjelang Lebaran, mempersiapkan jalur alternatif distribusi bahan pokok mengantisipasi kepadatan lalu lintas menjelang Lebaran, serta menjamin keamanan penyaluran bahan kebutuhan pokok masyarakat melalui pengawasan distribusi khususnya barang-barang yang disubsidi bersama Kepolisian Daerah Provinsi Jatim yang bekerjasama dengan Dishub & LLAJ.

Sampai pekan ke-3 Juni 2015 berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta data SISKAPER-BAPO, harga sejumlah komoditas memang mulai menunjukkan peningkatan, khususnya pada komoditas beras, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah. Kendati demikian, laju kenaikannya cenderung bisa ditoleransi.

Hal itu terkonfirmasi dengan data inflasi di Jatim yang relatif relatif rendah. Inflasi Jatim pada Mei 2015 sebesar 0,41% (*month to month*) atau terendah ketiga di Kawasan Jawa setelah DKI Jakarta

(0,34%) dan DI Yogyakarta (0,36%). Dengan adanya berbagai strategi dan rencana aksi TPID Jatim di atas, diharapkan inflasi Jatim menjelang Ramadhan dan Lebaran 2015 dapat terkendali dan ketersediaan komoditas pangan strategis masyarakat dapat lebih terjaga.

Meski beragam jurus telah dikeluarkan, TPID tetap berharap masyarakat ikut aktif dalam menjaga psikologi harga selama Ramadhan dan Lebaran. Caranya cukup simpel, yaitu dengan membeli barang secukupnya dan sewajarnya. Masyarakat tak perlu khawatir soal pasokan, karena stok pangan Jatim menjelang Lebaran lebih dari cukup.

"Psikologi pasar ini penting karena kerap kali menjadi penentu pembentukan harga. Masyarakat tak perlu memborong komoditas, tak perlu *panic buying*, yang bisa memengaruhi pergerakan harga. Semua stok pangan di Jatim aman terkendali," ujar Soekowardojo

Dengan sinergi Operasi Pasar Bantuan Ongkos Angkut, produktivitas pangan yang prima, dan kedewasaan konsumen dalam melakukan konsumsi saat Ramadhan-Lebaran, lonjakan harga yang ugal-ugalan pun bisa diantisipasi. Masyarakat pun bisa berlebaran dengan senyum mengembang lantaran pendapatannya tak kelewat banyak digerus inflasi. ■

**K**ELUARGA Zaenal sudah dua tahun ini tidak perlu bersusah payah jika hendak pulang ke kampung halaman menjelang Lebaran. Dia tak perlu lagi repot mengalokasikan pengeluaran rutin untuk membeli tiket angkutan bus ke Ngawi, Jawa Timur, bagi lima anggota keluarganya.

"Saya selalu ikut program mudik gratis Pemprov Jatim. Mudik gratis naik bus hingga di depan rumah," kata Zaenal dengan wajah berseri di halaman DLLAJR Pemprov Jatim. Anaknya berlarian ceria menjelang keberangkatan bus menuju tempat sang bapak dilahirkan dan dibesarkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan tiga moda transportasi gratis sebagai angkutan untuk arus mudik dan balik Lebaran 2015, yaitu bus, kereta api, dan kapal laut. "Pemprov Jatim memberangkatkan 156.898 penumpang pada angkutan Lebaran 2015 dengan menggunakan angkutan darat, laut, dan kereta api," ujar Kepala Dinas Perhubungan & LLAJ Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi.

Wahid memaparkan, untuk mudik gratis dengan angkutan

darat telah disiapkan 470 unit bus dari Pemrov Jawa Timur, 24 unit bus dari Pemkab/Kota Jawa Timur, dan 117 unit bus dari pihak swasta (Asuransi Jasa Raharja, Radar Surabaya, Kadin Surabaya, dan Indomaret). Total kuota jumlah penumpang mudik gratis yang akan diangkut dengan bus adalah 59.755 penumpang.

Pemrov Jawa Timur juga menyediakan delapan unit truk untuk angkutan mudik gratis sepeda motor. Jumlah kuota mudik gratis sepeda motor yang disediakan adalah 400 unit sepeda motor untuk jurusan Jember, Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Madiun.

Adapun untuk mudik gratis dengan angkutan laut, Pemprov Jatim telah menyiapkan dua unit kapal TNI AL dan satu unit kapal swasta yang akan mengangkut penumpang dan sepeda motor di Kepulauan Madura, khususnya pada rute angkutan kapal perintis. Adapun rute yang akan dilayani adalah Tanjung Perak-Masalemba (PP), Kalianget-Kangean (PP), dan Tanjung Wangi-Sapeken (PP). Total kuota jumlah penumpang mudik gratis yang akan diangkut dengan kapal laut adalah 7.200 pen-



## MUDIK GRATIS 2015

### ANGKUTAN DARAT

- Pemprov Jawa Timur 470 unit bus
- Pemkab/Kota Jawa Timur 24 unit bus
- Pihak swasta (Asuransi Jasa Raharja, Radar Surabaya, Kadin Surabaya, dan Indomaret) 117 unit bus

### Total 59.755 penumpang

- Angkutan mudik gratis sepeda motor 8 unit truk
- Kuota 400 unit sepeda motor untuk jurusan Jember, Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Madiun.

### ANGKUTAN KERETA API

- 14 rangkaian kereta untuk mengangkut 89.943 penumpang jurusan Surabaya-Madiun, Surabaya-Bojonegoro, Surabaya-Banyuwangi, Surabaya-Malang-Blitar.

### ANGKUTAN LAUT

- Dua unit kapal TNI AL dan satu unit kapal swasta Tujuan Tanjung Perak-Masalembu (PP), Kaliangget-Kangean (PP), dan Tanjung Wangi-Sapeken (PP).

### Total kuota 7.200 penumpang



umpang.

Untuk mudik gratis dengan angkutan kereta api, sebanyak 14 rangkaian kereta telah dipersiapkan Pemprov Jatim untuk mengangkut 89.943 penumpang untuk jurusan Surabaya-Madiun, Surabaya-Bojonegoro, Surabaya-Banyuwangi, Surabaya-Malang-Blitar.

Terkait penggunaan sarana transportasi kereta api, Gubernur Jawa Timur Soekarno mengemukakan kepada Menteri Perhubungan untuk tidak menaikkan tarif kereta api. Hal tersebut disebabkan, kereta api merupakan salah satu moda transportasi umum yang saat ini diminati oleh masyarakat Jatim. "Kereta api menjadi transportasi yang diminati masyarakat Jatim. Tingkat kenyamanan menggunakan kereta api dirasa menjadi alasannya. Saya berharap agar tidak ada kenaikan tarif kereta api," tambah pejabat yang akrab dipanggil Pakde Karwo itu.

Untuk diketahui, kebijakan kenaikan tarif KA pada 28 Maret 2015 menjadi faktor determinan tingginya inflasi di Jawa Timur. Sebab, Jatim adalah provinsi dengan intensitas pengguna KA tertinggi di Indonesia, baik di dalam maupun antarprovinsi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Sairi Hasbulah menjelaskan, di Indonesia, jalur KA hanya terdapat di Jawa dan sebagian kecil Sumatra. "Otomatis, kenaikan tarif KA tidak memengaruhi provinsi lain. Sementara di Jatim, intensitas penumpang KA sangat tinggi," jelasnya.

Dari aspek ekonomi, program mudik gratis ini ikut menjadi bantalan bagi daya beli masyarakat menjelang Lebaran. Dengan program ini, sebagian masyarakat tak perlu merogoh kocek untuk pulang ke kampung halamannya. Ini tentu saja ikut membantu menjaga daya beli warga di tengah banyaknya kebutuhan menjelang Lebaran. Inflasi pun bisa ikut terkelola karena program mudik gratis adalah upaya "memperbanyak penawaran" di tengah permintaan mudik yang membeludak. Keseimbangan penawaran dan permintaan jasa transportasi ini mencegah harga melambung tak terkendali.

Tak hanya membantu pengelolaan inflasi, program mudik ini berperan signifikan dalam menekan angka kecelakaan lalu-lintas. "Strategi Pemprov Jatim membuat program angkutan mudik gratis sepeda motor ternyata



Strategi Pemprov Jatim membuat program angkutan mudik gratis sepeda motor ternyata cukup efektif dalam menurunkan angka kecelakaan motor. Sejak tahun 2012 angka kecelakaan motor *trennya* menurun. Namun, kalau ingin lebih menekan angka kecelakaan motor adalah dengan membuat aturan yang melarang mudik dengan sepeda motor.

**Dr. Ir. MASCHUS, MSTR**

Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS)

cukup efektif dalam menurunkan angka kecelakaan motor. Sejak tahun 2012 angka kecelakaan motor *trennya* menurun. Namun, kalau ingin lebih menekan angka kecelakaan motor adalah dengan membuat aturan yang melarang mudik dengan sepeda motor," kata pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Dr. Ir. Maschus, MSTR.

Data Polda Jatim menyebutkan tahun 2012 terjadi laka lantas 5 juta kasus, 2013 turun menjadi 4 juta kasus, dan 2014 turun lagi menjadi 3 juta kasus. Selama arus mudik, rata-rata per 1 jam ada satu orang meninggal dunia akibat laka lantas. "Program mudik gratis membantu menekan angka kecelakaan," kata AKBP Juli Setiadi dari Ditlantas Polda Jatim. ■

## Sertifikasi Hortikultura untuk Menembus Pasar Dunia

Tak semudah membalik telapak tangan untuk membawa komoditas hortikultura Jawa Timur bisa digdaya di negeri sendiri sekaligus terbang ke negeri seberang. Pemerintah bergegas meningkatkan daya saing dan daya jual hortikultura lokal dengan sertifikasi dan standarisasi lembaga internasional.

**W**AJAH Abdul Samid terlihat murung. Dalam pikirannya terbersit kekhawatiran. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 membuat usaha budidaya horti-

kultura yang dikembangkannya terancam. Pasar tunggal yang membuat produk pertanian bebas dijual di sesama negara anggota ASEAN itu bisa membuat produknya kalah bersaing dengan produk hortikultura dari Thailand, Singapura, bahkan Malaysia.

"Jangankan bermimpi untuk ekspor, saya khawatir produk kami tersisih di negeri sendiri. Pemerintah harus bertindak, saat MEA 2015 bergulir, Indonesia bisa jadi hanya akan jadi pangsa pasar negara lain," kata Samid yang memiliki perkebunan mangga di Probolinggo itu.

Untungnya keluhan pengusaha hortikultura itu didengar Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui Dinas Pertanian, Pemprov Jatim aktif melakukan program sertifikasi dan standarisasi produk hortikultura. "Sertifikasi dan standarisasi dari lembaga interna-

asional menjadi modal utama untuk bisa bersaing di dalam pasar bebas. Ini paling tidak sudah dimiliki Kabupaten Lumajang pada dua komoditas hortikulturnya," kata Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Jawa Timur, Bambang Heriyanto.

Bambang mengatakan, dua produk hortikultura asal Lumajang itu adalah pisang mas kirana dari kawasan Senduro dan salak dari kawasan Pronojiwo. "Dua-duanya sudah memperoleh sertifikat Global Agricultural Practices (GAP). Sertifikasi ini merupakan persyaratan utama agar produk buah-buahan nasional bisa bersaing di tengah-tengah gempuran produk ASEAN," ujarnya.

Pisang Mas Kirana adalah produk hortikultura pertama di Indonesia yang masuk Global GAP. Dengan adanya sertifikasi tersebut, permintaan dari luar negeri untuk produk pisang mas kirana sangat tinggi. Sedangkan untuk Salak Pronojiwo adalah produk hortikultura kedua di Indonesia yang diakui dan mendapat sertifikasi GAP.

Sertifikasi dan standarisasi dari lembaga internasional menjadi modal utama untuk bisa bersaing di dalam pasar bebas. Ini paling tidak sudah dimiliki Kabupaten Lumajang pada dua komoditas hortikulturnya.

#### **BAMBANG HERIYANTO**

Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Jawa Timur

Sebentar lagi, sejumlah komoditas lain akan menyusul, seperti mangga dari Kabupaten Pasuruan dan Situbondo serta bawang merah dari Kabupaten Nganjuk. Ketika produk pertanian berstandarisasi, kata dia, maka bisa bersaing dengan produk impor. "Kami punya produk dengan standar seperti ini, maka produk yang masuk minimal seperti ini standarnya. Kalau standarnya tidak ada, maka sulit untuk menolak produk-produk impor masuk," jelasnya.

GAP merupakan sistem sertifikasi proses produksi pertanian menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga, komoditas dapat aman untuk dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani.

Jawa Timur sebenarnya sudah mempunyai produk berkategori prima. Artinya aman dikonsumsi. Jumlahnya mencapai ratusan, mulai pisang, manga, cabai, bawang merah, hingga padi. Setelah mengantongi sertifikasi GAP, ada prosedur yang harus dilakukan selanjutnya yakni dengan registrasi kebun oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi. Setelah registrasi kebun, prosedur terakhir adalah sertifikasi produk yang hendak dipasarkan.

Pemprov Jatim dengan dukungan pemerintah pusat hingga kini terus mendorong agar semua pihak yang ada dalam sektor hortikultura menghadapi MEA dengan menetapkan standarisasi yang bisa membuat produk Indonesia diterima di kancah interna-



sional. Komoditas buah yang sudah terverifikasi di kancah ASEAN di antaranya adalah manggis, pepaya, salak, melon, pisang, alpukat, dan nanas.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 tersebut salah satunya dengan membangun standarisasi mutu produk yang akan di-

pasarkan. Dia menyebutkan, dalam penerapan standarisasi tersebut pihaknya akan menentukan mana produk yang layak masuk di pasar dan mana yang tidak sesuai standar. "Kita mencocokkan standarisasi dari salah satu merk dagang di Jerman yang membuat standarisasi untuk barang-barang yang masuk. Sekarang standarisasi tersebut dilakukan oleh Australia," ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini menyebutkan, standarisasi produk ini berlaku ketat. Misalnya produk buah mangga apabila terdapat bekas hitam sedikit akan ditolak masuk. "Oleh karena itu kita akan standarisasi semua produk, misalnya kadar toksin, pestisida dan bahan-bahan kimia apa yang membahayakan akan kita tolak," ujarnya.



Potensi pasar hortikultura di Indonesia sangat tinggi seiring pertumbuhan kelas menengah yang tahun lalu saja sudah sebesar 56,5 persen dari total penduduk yang mencapai 250 juta jiwa. Potensi besar tersebut harus diimbangi dengan pasokan dari dalam negeri yang memadai, tetapi kenyataannya impor hortikultura justru semakin besar setiap tahunnya.

Impor hortikultura Indonesia pada tahun 2011 lalu sudah mencapai Rp17,6 triliun, lebih tinggi dari nilai impor gandum Rp17,02 triliun, beras Rp10,6 triliun, jagung Rp8,61 triliun, dan kedelai Rp9,38 triliun. Sementara sampai semester I 2014 impor hortikultura telah mencapai 863,6 juta dolar AS atau setara Rp10 triliun lebih dengan volume 878.200 ton.

Luas lahan pertanian sayuran Indonesia juga jauh tertinggal dibanding negara lain. Thailand 100 meter persegi perkapita, Filipina 65 meter persegi perkapita, Vietnam 80 meter persegi perkapita, Myanmar 60 meter persegi per kapita, sedangkan Indonesia 40 meter persegi per kapita.

Apa yang dilakukan Pemprov Jatim dengan terus mendorong sertifikasi tak lain adalah ikhtiar mengangkat derajat komoditas hortikultura agar bisa digdaya di dalam negeri dan juara di negeri orang. Minimal, pasar dengan populasi jumbo di dalam negeri bisa dimenangi oleh para petani kita sendiri. Muara dari semua itu adalah kesejahteraan petani yang otomatis mengerek pendapatan dan daya beli mereka. ■

## Infrastruktur Pertanian yang Menjaga Harapan

Para pemangku kepentingan di Jawa Timur bersinergi mendorong terwujudnya sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Infrastruktur pertanian menjadi kunci, sehingga terus dipacu dan diperluas pembangunannya.

**M**ASA kecil Gubernur Jawa Timur Soekarwo dihabiskan di Palur, sebuah desa agraris yang terletak tujuh kilometer dari jalan raya Madiun-Ponorogo. Bapak dan ibunya adalah petani yang tekun dan rajin, sehingga memiliki lahan luas yang lebih dari cukup untuk membiayai studi anaknya. Masa kecil itu begitu kuat tertanam di benak Pakde Karwo, panggilan karib Soekarwo.

Tak mengherankan, saat mendapat kesempatan bisa membuat kebijakan di Jawa Timur, Soekarwo berkomitmen kuat untuk melindungi pertanian. Dia bekerja menggairahkan sektor pertanian terutama untuk menggapai indikator peningkatan hasil pertanian yang baik, yaitu bertambahnya indeks pertanaman di Jatim.

Salah satu instrumen terpenting bagi peningkatan kinerja sektor pertanian adalah ketersediaan infrastruktur pertanian yang memadai. Pemprov Jatim pun terus melakukan optimalisasi lahan

dan air di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sejumlah waduk terus dipacu pembangunannya. Sebagian telah selesai, sebagian lagi dalam proses pembangunan. Waduk-waduk tersebut di antaranya adalah Waduk Gongseng di Bojonegoro, Waduk Bendo di Ponorogo, Waduk Tugu di Trenggalek, Waduk Bajulmati di Banyuwangi, dan Jabung Ring Dyke di Lamongan.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, pada 2015, luas baku sawah beririgasi di Jatim sebesar 934.376 hektar (ha). Di Jatim sendiri terdapat tujuh wilayah sungai dan 530 waduk/embung/rawu. Ketersediaan air di Jatim sebesar 19,3 miliar kubik, dengan kebutuhan air sebesar 22,2 miliar kubik. Sehingga, saat ini Jatim defisit neraca air sebesar 2,9 miliar kubik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur sumberdaya air untuk sektor pertanian menjadi hal yang tak boleh ditunda lagi.

Pakde Karwo menyampaikan beberapa saran kebijakan

pengembangan sektor pertanian. Di antaranya penanganan penurunan laju konversi lahan pertanian, peningkatan indeks pertanaman melalui pengembangan irigasi melalui percepatan pembangunan Infrastruktur Pertanian (Jitut/Jides dan Waduk/Embung), pengembangan inovasi teknologi produksi, pemetaan dan penataan komoditas pangan unggulan daerah, peningkatan akses petani terhadap teknologi, sarana produksi, kredit dan pasar, dan pengembangan pertanian sehat dan berkelanjutan.

Dalam catatan Dinas Pertanian Jatim, pembangunan infrastruktur pertanian salah satunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (Jitut/Jides) terus bertambah dalam periode 2011-2015. Jika pada 2011 rehabilitasi Jitut/Jides mencakup 21.675 ha lahan pertanian, pada tahun 2015 jumlahnya berlipat hampir 20 kali hingga mencapai 406.175 ha.

Dinas Pertanian juga melakukan berbagai program dalam rangka pengembangan infrastruktur pertanian untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat anomali iklim yang terjadi pada 2015. Beberapa program diantaranya pengembangan pompanisasi dan teknologi hemat air untuk penganggulangan kekeringan, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air alternatif (embung, sumur air tanah dangkal/dalam, sungai, sumur pantek, dll), dan pengaplikasian teknologi irigasi intermitten.

Upaya Pemprov Jatim mengembangkan pertanian didukung oleh Bank Indonesia (BI). Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Benny Siswanto menyatakan, sektor pertanian adalah sektor strategis di Jawa Timur. BI bersama para pemangku kepentingan yang lain mencoba mendorong terwujudnya agroindustri yang bisa mengolah bahan baku sektor pertanian menjadi lebih bernilai tambah.

"Berkembangnya agroindustri memberikan dampak positif kepada sektor perdagangan melalui ketersediaan pasokan barang dan memperbesar kapasitas ekspor," papar Benny.

Berpadunya antara industri pengolahan dan pertanian adalah mimpi Jawa Timur yang mulai mewujud menjadi nyata. Sektor industri pengolahan berkontribusi sekira 29 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Adapun sektor pertanian memberi kontribusi 14 persen.

Namun, dalam pelaksanaannya, industri pengolahan Ja-



tim untuk memproses produk pertanian juga menghadapi tantangan yang tak mudah. Tantangan itu di antaranya adalah biaya tenaga kerja, energi, dan bahan baku. Sementara sektor pertanian terhambat soal keterbatasan lahan, minimnya akses permodalan, serta rendahnya tingkat kesejahteraan petani.

Benny berpendapat guna mengoptimalkan kinerja dua sektor utama tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jatim, maka pengolahan dan pertanian dapat dikolaborasikan menjadi agroindustri.

Analisis sektor agroindustri Jawa Timur dalam Kajian Ekonomi

**SARAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN**

- Penanganan penurunan laju konversi lahan pertanian
- Peningkatan indeks pertanaman melalui pengembangan irigasi melalui percepatan pembangunan Infrastruktur Pertanian (Jituh/Jides dan Waduk/Embung)
- Pengembangan inovasi teknologi produksi
- Pemetaan dan penataan komoditas pangan unggulan daerah
- Peningkatan akses petani terhadap teknologi, sarana produksi, kredit dan pasar
- Pengembangan pertanian sehat dan berkelanjutan.

dan Keuangan Regional (KEKR) yang dipublikasikan BI Jatim menyebutkan pentingnya peran agroindustri, dimana pada akhir tahun lalu ekspor produk agroindustri berkontribusi 25,83% terhadap total ekspor Jatim dengan impor bahan baku yang cenderung rendah yaitu 6,62% dari total impor..

Pemprov Jatim dan para pemangku kepentingan lainnya mendorong terwujudnya nilai tambah sektor pertanian dengan terus memberikan stimulan. Beragam pelatihan pemberian nilai tambah sektor pertanian digelar dengan menasar langsung para kelompok tani. Fasilitas mesin pengolahan dengan teknologi sederhana yang tepat guna pun diberikan. Semua gerak tersebut diharapkan bisa mewujudkan asa kesejahteraan petani dengan produk pertanian yang semakin berdaya saing.■



# Gotong Royong Membesarkan Ternak Potong

Jawa Timur, yang dikenal sebagai gudang ternak, dihadapkan pada tantangan pengembangan sektor peternakan untuk bisa memasok kebutuhan warga yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Sinergi banyak kalangan berhasil mendorong program kemitraan ternak potong untuk meningkatkan efisiensi tata niaga pangan di provinsi ini.

**K**USNAN berkeluh kesah. Kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, peternak sapi dari Kabupaten Bojonegoro itu mengatakan, selama ini para peternak tidak mendapat perlakuan seperti petani yang banyak menerima subsidi dari pemerintah.

Mendapat pertanyaan tersebut, Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf, dengan semangat menjelaskan bahwa Pemprov Jatim memiliki program pemberian subsidi. "Pemerintah bertugas membuat regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, namun peternak juga harus militan dan bekerja keras," tutur Gus Ipul.

Agar populasi sapi potong maupun sapi perah terus berkembang, Pemprov Jatim juga melakukan penetapan kebijakan-kebijakan lain. Di antaranya adalah dengan optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) Sejuta Akseptor Sapi, pengembangan wilayah sumber bibit sapi, serta pengendalian pemotongan sapi dan kerbau betina produktif dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012.

"Juga dengan mengendalikan pengeluaran ternak sapi potong dan sapi perah melalui rekomendasi berat badan minimal sapi yang bisa keluar Jatim," jelasnya.

**POTENSI MELIMPAH**

Potensi Jatim di sektor peternakan memang teramat meyakinkan. Populasi sapi potong di Jatim pada 2014 mencapai 4,12 juta ekor, yang terdiri atas jenis sapi potong Peranakan Ongole (PO), Sapi Madura dan persilangan hasil Inseminasi Buatan (Kawin Suntik). Jumlah populasi tersebut merupakan populasi terbesar di Indonesia, yang berkontribusi 32 persen terhadap populasi nasional.

Total ketersediaan (suplai) ternak potong dari Jatim pada 2015 adalah sebanyak 916.240 ekor. Adapun kuota suplai ternak potong ke DKI Jakarta ialah 119.000 ekor, Provinsi Jabar sebanyak 104.262 ekor, Provinsi Banten sebanyak 34.695 ekor, dan kebutuhan BUMN



Sektor peternakan harus dikembangkan secara berkelanjutan. Jatim pun sigap mewujudkannya. Target kelahiran anak sapi (*pedet*) pada 2015 mencapai 1,15 juta ekor. Target itu tentunya untuk memenuhi target pemotongan sapi di Jatim sebanyak 553 ribu ekor, dan kontribusi ke provinsi lain melalui pengeluaran sapi sebanyak 310 ribu ekor. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2015 ini terjadi peningkatan populasi sebanyak 239 ribu ekor atau menjadi 4,38 juta ekor.

dan provinsi luar pulau sebanyak 52.043 ekor. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan pemotongan di Jatim dibutuhkan 477.040 ekor dengan jumlah pemotongan rata-rata 1.300 ekor per hari.

Tentu ke depan kebutuhan ternak bakal terus menggemuk seiring membaiknya perekonomian dan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, sektor peternakan harus dikembangkan secara berkelanjutan. Jatim pun sigap mewujudkannya. Target kelahiran anak sapi (*pedet*) pada 2015 mencapai 1,15 juta ekor. Target itu tentunya untuk memenuhi target pemotongan sapi di Jatim sebanyak 553 ribu ekor, dan kontribusi ke provinsi lain melalui pengeluaran sapi sebanyak 310 ribu ekor. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2015 ini terjadi peningkatan populasi sebanyak 239 ribu ekor atau menjadi 4,38 juta ekor.

"Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan daging, baik di DKI Jakarta maupun provinsi lainnya, kami berharap melalui target tersebut Jatim mampu terus memasok kebutuhan daging nasional," harap Gus Ipul.



Untuk menjaga ketersediaan sapi potong di Jatim, program kemitraan dengan menggandeng pihak swasta juga terus dilakukan. Salah satunya dengan PT Santosa Agrindo (Santori) yang mendatangkan 2.000 indukan sapi potong dari Australia.

Sapi indukan itu dipelihara di kandang Santori di Desa Tongas, Probolinggo, Jawa Timur. Setelah diinseminasi dan bunting, 2.000 ekor sapi indukan itu akan dijual kepada peternak di Malang dan sekitarnya dengan harga Rp 56.000 per kilogram berat badan.

Kelompok peternak binaan bisa membeli dan memelihara sapi indukan yang sudah bunting minimal enam bulan melalui Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia. Santori yang memfasilitasi pengadaan sapi indukan dan membuntingkan, akan membeli kembali sapi bakalan dari hasil anakan yang lahir.

Spesifikasi indukan yang diimpor, mengikuti persyaratan yang di-

tetapkan Kementerian Pertanian untuk rencana impor 50 ribu indukan pada 2016. Yakni jenis Brahman Cross, umur 2-4 tahun, produktif, tidak memiliki cacat tubuh, dan organ reproduksinya sehat.

Pola kemitraan pembiakan ini terobosan untuk meningkatkan produksi sapi bakalan yang dibutuhkan bagi usaha penggemukan Santori di Probolinggo, Jawa Timur. Meski membutuhkan waktu lebih lama, kemitraan pembiakan ini upaya untuk menghasilkan sapi bakalan tanpa harus tergantung impor. Dengan kemitraan yang dijalankan diharapkan dapat menyediakan sapi potong dalam jumlah yang mencukupi dan dalam waktu yang bersamaan.

Kini, sudah saatnya para pemangku kepentingan di Jatim bergandengan tangan, memupuk sinergi, mewujudkan asa pengembangan sektor pertanian yang mampu memberi nilai tambah optimal bagi seluruh elemen, khususnya para peternak. ■

## SEKRETARIAT

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI JAWA TIMUR



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya  
Phn. (031) 3520011 | Fax. (031) 3520025  
[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)



**PEMROV JATIM**

**BIRO ADMINISTRASI DAN PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya  
Phn. (031) 3533906 | Fax. (031) 3550958  
[www.jatimprov.go.id](http://www.jatimprov.go.id)

